



**BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTT**

LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



Biroorganisasintt



organisasi_nttprov



Biro Organisasi Setda Provinsi NTT



www.biro-organisasi.nttprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode triwulan I tahun 2025. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Subkegiatan serta anggaran dalam triwulan I.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Besar harapan kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

Kupang, 30 Juni 2025

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291990031002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	ii
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	5
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5
B. Program Penataan Organisasi	8
BAB III CAPAIAN KINERJA.....	12
1. Realisasi Kinerja Triwulan I	12
a. Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “memuaskan” (Kategori BB/Nilai =70-80).....	10
b. Level Maturitas Kelembagaan	10
c. Indeks Pelayanan Publik	11
d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	12
e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.....	12
2. Realisasi Anggaran Triwulan I.....	16
BAB IVPENUTUP	19
1. Kesimpulan	19
2. Saran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit perangkat daerah yang wajib bertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja Biro. Guna memastikan capaian kinerja berjalan sesuai dengan target kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung, sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan dan capaian kinerja bisa dicapai lebih optimal.

Menurut Kementrian pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa, "Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran".

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang capaian kinerja yang diraih Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I
2. Memberikan masukan perbaikan atau percepatan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna realisasi kinerja pada triwulan berikut.
3. Bahan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi SAKIP guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

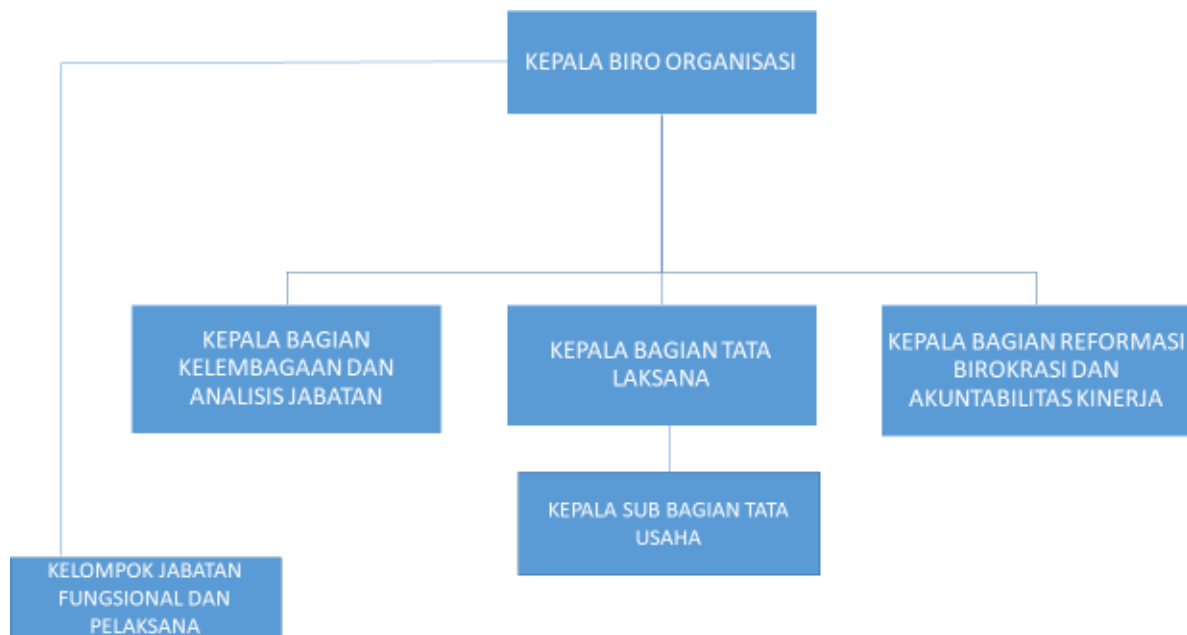
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Tugas yaitu : membantu asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai :

1. Kepala Biro Organisasi
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.243.775.197,00** terdiri dari :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.21.883.000,00
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp.29.915.700,00
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp.21.097.500,00
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.170.878.997.000,00
- 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.21.000.000,00 , terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.17.750.000,00
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.3.250.000,00
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.295.235.800,00, terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.40.235.300,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.2.400.000,00

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp.40.451.500,00
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp.25.900.000,00
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.186.249.000,00
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.34.200,00 , terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.34.200,00
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp.63.460.400,00 terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.4.000.400,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.3.780.000,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.55.680.000,00-
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.86.477.600,00 terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.44.103.800,00
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.42.373.800,00

B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sebesar Rp. 1.342.304.902,00

dengan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp.502.386.100,00-, terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi sebesar Rp.274.998.400,00
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sebesar Rp.22.964.300,00
- c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan sebesar Rp.204.423.400,00

2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.839.918.802,00 terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp.183.859.502,00
- b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.249.999.700,00
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebesar Rp. 11.200.000,00
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan sebesar Rp.194.860.600,00
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.199.999.000,00

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Tujuan Biro Organisasi :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

b. Sasaran Biro Organisasi :

Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi di atas dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yaitu menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat beberapa indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi antara lain :

- a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat BB “Sangat Baik” (Kategori BB)
- b. Level Maturitas Kelembagaan
- c. Indeks Pelayanan Publik
- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik
- e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025 s/d 2027 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET			FORMULA INDIKATOR
				2024	2025	2026	2027	
1	2	3		4	5	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	15,15	30,30	45,45	50	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan;	N/A	30	34	38	$\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

			d. standar operasional prosedur; e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.					
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	3,56 (baik)	3,60 (baik)	3,65 (baik)	3,70 (baik)	(Nilai F02 x 0,75) + (Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25)
		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja “memuaskan” A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	12	18	24	30	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$

BAB III

CAPAIAN KINERJA

1. Realisasi Kinerja Triwulan I

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80)

Realisasi kinerja Triwulan I Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang Reformasi Birokrasi berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Presentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat Reformasi Birokrasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik dikoordinasikan oleh 5 Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro Pengadaan barang dan Jasa mengkoordinasikan tema P3DN, Biro Perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju inflasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses.

b. Level Maturitas Kelembagaan

Realisasi kinerja Triwulan I Level Maturitas kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun 2022 yaitu **40.67** atau kategori tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Sedangkan Penilaian Tingkat Kematangan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sementara dilakukan untuk menghasilkan nilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah. Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan PD diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh PD pada setiap variabel dan indikator.

Masih terdapat Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

c. Indeks Pelayanan Publik

Nilai Indeks Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;
3. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public;
4. Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
5. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar public pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
6. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
7. Fasilitasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik(MPP);
8. Pendampingan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;
9. Melakukan revisi terhadap SOP AP perangkat daerah.

d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian sasaran strategis reformasi birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik dikoordinasikan oleh 5 Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro Pengadaan barang dan Jasa mengkoordinasikan tema P3DN, Biro Perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju inflasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses.

e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah akan diperoleh pada bulan Juli 2025 bersamaan dengan berakhirnya tahapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah. Oleh karena itu sampai dengan saat ini nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 belum dirilis.

2. Realisasi Anggaran Triwulan I

Pada tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan sampai dengan triwulan I sudah terealisasi sebesar 25% atau Rp. 375.000.000,- rincian anggaran dan realisasi anggaran tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	709.983.197,00	173.945.540,00	24.50
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.775.197,00	62.167.700,00	25,50
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan daerah	21.883.000,00	3.501.700,00	16,00
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.915.700,00	-	-
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan	21.097.500,00	-	-

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.4.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	170.878.997,00	58.666.000,00	34,33
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	-	-
2.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.750.000,00	-	-
2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	-	-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.235.800,00	72.363.240,00	24,51
3.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.235.300,00	13.385.500,00	33,27
3.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	600.000,00	25,00
3.3.	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	14.544.300,00	35,95
3.4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.900.000,00	13.000.000,00	50,19
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.249.000,00	30.833.440,00	16,55
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.200,00	-	-
4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	34.200,00	-	-
4.2.	Belanja Modal Personal Computer (USB)	34.200,00	-	-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	63.460.400,00	16.165.000,00	25,47
5.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.400,00	2.000.000,00	50,00
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	945.000,00	25,00
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	11.220.000,00	20,15
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.477.600,00	23.249.600,00	26,89
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.103.800,00	12.773.000,00	28,96
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan	42.373.800,00	10.476.600,00	24,72

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Mesin Lainnya			
II	Program Penataan Organisasi	1.342.304.902,00	152.545.660,00	11,36
1.	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	502.386.100,00	82.151.760,00	16,35
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	274.998.400,00	42.722.860,00	15,54
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.964.300,00	1.161.000,00	5,06
1.3.	Fasilitas Penataan Analisis Jabatan	204.423.400,00	38.267.900,00	18,72
2.	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	839.918.802,00	70.393.900,00	8,38
2.1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	183.859.502,00	746.500,00	0,41
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	249.999.700,00	53.422.400,00	21,37
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.200.000,00	-	-
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	194.860.600,00	11.925.000,00	6,12
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	199.999.000,00	4.300.000,00	2,15

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan I sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja Triwulan I Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80) tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- b. Realisasi kinerja Triwulan I Level Maturitas kelembagaan masih sama dengan Tahun 2023 yaitu 40.67 atau kategori tinggi. Pada tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran. Sedangkan Penilaian Tingkat Kematangan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sementara dilakukan untuk menghasilkan nilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah.
- c. Nilai indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menggunakan data Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.
- d. Realisasi kinerja Triwulan I Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi dan nilai SAKIP akan diperoleh bulan Juli 2025.

2. Saran

Saran dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan I sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah perlu konsisten dalam menyampaikan data pendukung berupa bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.
- b. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi sesuai perkembangan regulasi yang baru.

- c. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pimpinan puncak sampai dengan pelaksana dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia, Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik guna terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.
- d. Koordinasi yang intensif dengan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna merubah 2 indikator Reformasi Birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.